

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUKU SEKOLAH
ELEKTRONIK (BSE) KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KOTA YOGYAKARTA
(Studi kasus di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 Yogyakarta)**

Zaenal Irawan, Maya Eka Sari, Muthia Umi Setyoningrum
Mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

With the rapid development of information and communication technologies leads the Ministry of National Education to conduct a basic reformation on educational books with by issuing innovation policies in the form of School Book Electronic (BSE) in order to provide a mass of textbooks, with low-cost, good quality and technology. This study was aimed at finding out how the BSE policy was implemented and what obstacles were found in the field.

The study listed different types of research with a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews, observation, and triangulation documentation as data collection techniques. The sources of data in this study are the Head of Department of Education, headmasters, teachers, school staff, students and parents who were selected by using a purposive sampling technique and snowball sampling and the results of observation.

The research showed SMA Negeri 8 Yogyakarta SMA and SMA Negeri 9 Yogyakarta were ready with the necessary infrastructures to implement the BSE policy. However, the implementation of BSE policy at both schools were not effective. This was due to the following reasons: (1) Insufficient socialization by the government, (2) Human resources that have not been able to use particular technologies related to Internet, (3) unavailability of the management system in the use of BSE; (4) The limited collections of textbooks that are available in BSE and the inaccessibility of BSE ; (5) Status / Quality of schools. SMA Negeri 8 Yogyakarta as standard international schools and SMA Negeri 9 Yogyakarta as a national standard school think that the materials in BSE only includes basic competencies (standards). So, BSE is not suitable to support the achievement of school targets, and (6) Lack of strong legal base for BSE. There is no clarity of shared the authority, tasks and roles that must be executed by each institution included in the hierarchy of National Education Ministry.

Keywords: Policy Implementation, BSE

PENDAHULUAN

Salah satu sumber ilmu pengetahuan, buku menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam sistem pendidikan nasional, buku teks pelajaran merupakan komponen yang wajib dipenuhi pada setiap pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Hal ini dikarenakan, buku teks pelajaran merupakan jembatan komunikasi dalam rangka *transfer knowledge and transfer value* dari seorang guru kepada siswa. Dewasa ini, kompleksnya permasalahan perbukuan nasional, menjadi penghambat bagi peningkatan mutu pendidikan. Mulai dari permasalahan kesenjangan dalam ketersediaan dan persebaran buku sekolah yang tidak merata (antara sekolah di wilayah perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil); Mahalnya harga buku teks pelajaran, sehingga tidak mampu dijangkau oleh masyarakat; Buku ajar yang belum memenuhi standar nasional

pendidikan; Pendeknya masa pemakaian buku pelajaran sekolah; hingga terjadinya monopoli perbukuan oleh sekolah, penerbit, pedagang, maupun pemerintah sendiri.

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa banyak perubahan disegala aspek kehidupan manusia. Bidang pendidikan juga tidak bisa mengelak dari perubahan ini, bahkan sudah sewajarnya mengambil peran aktif untuk memanfaatkan TIK demi kemajuan pendidikan. Salah satunya dengan melakukan reformasi pendidikan yang diadaptasikan dengan perkembangan TIK. Pembaharuan dibidang pendidikan yang nyata dirasakan akibat perkembangan TIK adalah munculnya sistem pembelajaran dengan pendekatan teknologi elektronik, atau disebut juga e-pembelajaran (*e-learning*). Saat ini, proses pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari keberadaan komputer, internet dan produk-produk teknologi lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Kemendiknas melakukan reformasi mendasar bagi perbukuan nasional dengan mencetuskan terobosan dan inovasi baru berupa Buku Sekolah Elektronik (BSE). BSE merupakan wadah penunjang bagi program massal penyediaan buku teks pelajaran murah, berkualitas, dan berteknologi².

Program BSE yang telah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Agustus 2008³, bertujuan untuk menyediakan akses buku murah dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, baik pendidik maupun peserta didik. Melalui program BSE Kemendiknas, pemerintah berharap mampu mengobati keresahan dan kegelisahan para guru, siswa, dan orangtua bagi ketersediaan buku teks pelajaran sekolah. Serta mampu memberantas monopoli dan mafia perbukuan. Dalam hal ini, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menyajikan BSE dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) yang dipublikasikan melalui Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) pada website <http://bse.depdiknas.go.id> untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Namun sangatlah disayangkan, meskipun pemerintah telah menghabiskan APBN lebih dari Rp 46 miliar⁴ bagi kesuksesan BSE ini, namun dalam pelaksanaannya belumlah sesuai dengan harapan. Kebijakan BSE menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat, sekolah, maupun pemerintah sendiri. Disamping itu, banyak permasalahan dan hambatan mendasar dalam implementasi kebijakan BSE yang belum terselesaikan. Diketahui, masih terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata. Permasalahan mendasar berikutnya adalah berkaitan dengan rendah kualitas sumberdaya manusia Indonesia terhadap penguasaan teknologi. Banyak guru yang belum mampu menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Bahkan, tidak jarang para guru masih buta teknologi (*gaptek*), khususnya internet. Data 2010 menunjuk-kan dari 2,7 juta guru, hanya 80 ribu guru yang *melek* internet dan ada sekitar 80% masyarakat Indonesia yang termasuk kategori buta teknologi informasi.

Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang keberadaan dan cara memanfaatkan BSE kepada masyarakat, juga menjadi faktor penghambatnya. Dari hasil penelitian LIPI oleh Titiek Handayani (2009) diketahui, dari survei yang dilakukannya di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, masih banyak guru dan orang tua murid yang belum begitu mengerti terhadap BSE. Hingga kurangnya dukungan dari pemerintah daerah turut menghambat kesuksesan dalam implementasi BSE Kemendiknas.

Berdasarkan gambaran permasalahan seputar implementasi BSE di atas, dirasa sangat perlu melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi kebijakan BSE pada sekolah-sekolah di Yogyakarta. Hal ini didasari pada kenyataan di Yogyakarta, belum semua sekolah memiliki sarana-prasarana memadai dan bermanfaat secara optimal untuk kepentingan BSE, hingga kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada siswa, guru, dan masyarakat tentang BSE. Ditambah lagi belum semua guru di Yogyakarta *melek* internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan BSE Kementerian Pendidikan Nasional di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Yogyakarta. Manfaat penelitian bagi pemerintah yakni sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan analisis serta evaluasi dalam implementasi kebijakan BSE. Manfaat bagi sekolah yakni sebagai pertimbangan dalam implementasi dan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dalam pemanfaatan BSE. Manfaat bagi peneliti yakni memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan BSE di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Implementasi Kebijakan

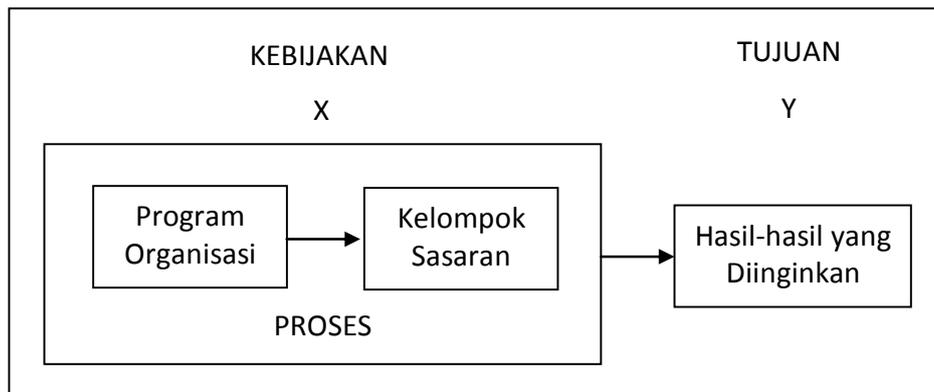
Implementasi kebijakan dipahami sebagai upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan yang dapat berupa program atau kegiatan. Dalam pengantar analisis kebijakan publik William N. Dunn (2003: 96-133), mendefinisikan analisis kebijakan (*policy analysis*) sebagai suatu aktivitas intelektual yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam hal ini, peneliti memandang analisis kebijakan sebagai aktifitas yang dilakukan selama proses kebijakan dengan tujuan mengetahui dan memahami secara mendalam suatu kebijakan yang diputuskan untuk diperoleh sebuah informasi mendalam berdasarkan pendekatan empiris (fakta), bersifat memberi penilaian dengan pendekatan evaluatif, dan bersifat anjuran dengan pendekatan normatif.

Analisis implementasi kebijakan berusaha menggali, sejauhmana efektifitas yang semula direncanakan untuk dicapai oleh kebijakan (program) dan dampak apa saja yang ditimbulkan olehnya, baik dampak yang terduga maupun tidak terduga sebelumnya. Serta hal-hal apa saja yang menjadi

penghambat dalam pelaksanaannya. Menurut Wibawa Samodra (1993) (dalam Rian Nugroho, 2009: 541-542) terdapat dua pendekatan dalam menjalankan analisis implementasi kebijakan yaitu pendekatan kepatuhan dan pendekatan apa yang terjadi.

Pendekatan kepatuhan adalah pendekatan dengan anggapan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh birokrasi atas yang memutuskan kebijakan tersebut. Sedangkan pendekatan apa yang terjadi (*what happening*) adalah pendekatan yang memotret suatu pelaksanaan kebijakan atau program dari segala hal. Pendekatan ini mendasari pada asumsi bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh segala variabel dan faktor. Dengan demikian, apa yang terlibat dan berlangsung dalam implementasi kebijakan jauh lebih penting untuk ditangkap dan dikaji daripada memper-soalkan kesesuaian implementasi dengan keharusan-keharusan yang terjadi.

Wibawa Samodra (1993) menyatakan bahwa variabel pengubah (*dependent variable*) Y adalah tujuan kebijakan yang diinginkan, sedangkan variabel bebas (*independent variable*) X adalah isi kebijakan yang berisi perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Secara sederhana komponen-komponen tersebut digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Hubungan Antarkomponen Kebijakan

Kebijakan Buku Sekolah Elektronik (BSE)

Buku Teks Pelajaran

Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah (SD/MTs, SMP/Mi dan SMA/SMK) yang memuat materi pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan. Buku teks pelajaran yang digunakan sebagai sumber belajar harus ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sedangkan untuk buku teks pelajaran bermuatan lokal ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota (Permendiknas No. 2/2008).

Untuk pengadaan buku teks pelajaran di sekolah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan Komite Sekolah. Guru dapat menganjurkan (tidak memaksa) siswa dan orangtua yang mampu untuk memiliki buku. Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa, baik langsung maupun tidak langsung. Kecuali buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah yang disesuaikan dengan aturan yang ada. Pengawasannya dilakukan oleh pengawas fungsional, komite sekolah atau masyarakat.

Pemerintah menyediakan buku teks pelajaran dengan harga murah yang tersedia dalam dua versi. Versi pertama adalah buku-buku yang telah dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas dan diterbitkan dalam bentuk *e-book* (BSE), sedangkan versi kedua adalah buku-buku yang tidak dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas, berasal dari para penerbit yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Kedua versi buku tersebut boleh diperdagangkan selama tidak melampaui batas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan (<http://pendidikan.jogja.go.id/>).

Buku Sekolah Elektronik (BSE)

Buku Sekolah Elektronik (BSE) merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan menyediakan buku ajar elektronik (*e-book*) untuk tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan SMK. BSE terdiri dari buku-buku pelajaran yang dinyatakan telah memenuhi standar nasional pendidikan oleh BSNP. Buku yang hak ciptanya telah dibeli pemerintah meliputi buku mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial, Biologi, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan, Ekonomi, Fisika, Geografi, Sejarah, Kimia, dan Matematika untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Adapun visi dan misi pemerintah melalui program buku sekolah elektronik Kemendiknas adalah menyediakan buku sekolah yang bermutu, murah, terjangkau, dan memenuhi standar nasional. BSE ditujukan untuk siswa, guru, dan seluruh masyarakat Indonesia dengan maksud:

1. menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa;
2. merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi;
3. memberi peluang kebebasan untuk menggandakan, mencetak, memfoto-copy, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan BSE tanpa prosedur perijinan, dan bebas biaya royalti sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Menteri;
4. memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Menteri (<http://bse.depdiknas.go.id>).

Sistem kerja buku elektronik ini adalah: semua buku yang sudah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah dari penulis dan penerbit, akan diubah dalam bentuk *e-book* dengan file *Portable Document Format* (PDF). Selanjutnya, *e-book* tersebut diunggah (*upload*) dengan memanfaatkan teknologi internet kedalam Jaringan Pendidikan Nasional (JARDIKNAS) dengan alamat resmi website yaitu <http://bse.depdiknas.go.id>, www.depdiknas.go.id, www.pusbuk.or.id, atau www.sibi.or.id. Ada beberapa fasilitas yang disediakan dalam BSE, yakni masyarakat dapat mengunjungi situs tersebut dan membaca langsung (*online*) dan mengunduhnya (*men-download*) kemudian dibaca atau dapat mencetaknya dalam bentuk buku (*hardcopy*) tanpa harus ijin terlebih dahulu.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas BSE, sekolah atau masyarakat harus memiliki jaringan internet dan beberapa perangkat teknologi lainnya seperti: komputer beserta perangkat lunak (*software*) pendukungnya diantaranya; *Adobe Acrobat Reader*, *WinRar* maupun *Adobe Flash 9 Player*. Dari kesemua perangkat lunak yang dibutuhkan, Kemendiknas telah menyediakan dalam *website* BSE dan masyarakat dapat mengunduhnya secara gratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya merupakan jenis penelitian kebijakan pendidikan (*policy research*) dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan memberikan penjelasan mendalam tentang implementasi kebijakan BSE Kementerian Pendidikan Nasional di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Yogyakarta dengan kegiatan analisis secara kualitatif.

Sekolah yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 9 Yogyakarta. Dipilihnya kedua sekolah tersebut didasari pada hasil survey awal, bahwasanya sekolah tersebut memenuhi kriteria utama dalam penelitian implementasi kebijakan BSE ini. Kriteria utama tersebut di antaranya: sekolah memiliki sarana prasarana pembelajaran yang memadai dan sudah

berbasis teknologi (media elektronik), telah memanfaatkan sistem pembelajaran berbasis teknologi (*e-learning*), dan memiliki jaringan internet yang mudah diakses seluruh warga sekolah.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama berupa pedoman observasi dan wawancara yang dilengkapi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dimana kedudukan peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian. Pemilihan sumber data penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi yang dilakukan secara bebas kepada pihak sekolah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan BSE. Adapun sumber data primer berasal dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian hingga data dirasa cukup (*redundancy*).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif kualitatif secara interaktif dan berkelanjutan (dari Miles & Huberman, 1984). Aktivitas dalam analisis data yaitu; *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan BSE

Pemerintah Pusat (Kemendiknas)

Dalam perkembangannya, buku-buku BSE tidak hanya tersaji dalam bentuk *e-book* dengan format PDF saja, akan tetapi sudah tersedia dalam bentuk buku maupun rekaman cakram (CD/DVD) dapat digandakan dan diperdagangkan dengan ketentuan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Mendiknas. Penambahan aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses BSE, baik dengan cara *downloadnya* maupun membacanya secara langsung (*on-line*).

Bila dilihat sepintas, Kemendiknas sebagai penanggungjawab kebijakan BSE dipandang secara teknis cukup siap untuk melaksanakannya, terkait aturan hukum dan teknis pelaksanaan, anggaran dan sumberdaya manusia. Akan tetapi program yang sudah dijalankan sejak 2008, dipandang belum maksimal. Berdasarkan hasil observasi masih didapati beberapa kekurangan di antaranya: belum semua buku teks pelajaran pokok tersedia dalam BSE, belum ada server khusus dimasing-masing wilayah untuk mempermudah dalam akses BSE dan belum ada sistem pengawasan dan koordinasi yang jelas antara Kemendiknas dengan Dinas Pendidikan.

Tabel 1. Data Buku Teks Pelajaran dalam Bentuk BSE

NO	MATA PELAJARAN	JENJANG				TOTAL
		SD	SMP	SMA	SMK	
1	Matematika	52	15	22	7	96
2	Bahasa Indonesia	61	33	38	8	140
3	Pendidikan Kewarganegaraan	58	38	-	-	96
4	Ilmu Pengetahuan Alam	64	35	-	-	99
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	56	33	-	-	89
6	Bahasa Inggris	-	-	10	-	10
7	Fisika	-	-	29	-	29
8	Biologi	-	-	29	-	29
9	Kimia	-	-	32	-	32
10	Sosiologi	-	-	31	-	31
11	Antropoligi	-	-	8	-	8
12	Sejarah	-	-	14	-	14
13	Geografi	-	-	29	-	29
14	Ekonomi	-	-	29	-	29
15	Teknologi Informasi dan Kom.	-	-	5	-	5
16	Mesin	-	-	-	26	26
17	Bangunan	-	-	-	15	15
18	ICT/Elektro	-	-	-	14	14
19	Teknologi Industri	-	-	-	16	16
20	Seni dan Kerajinan	-	-	-	23	23
21	Pertanian	-	-	-	16	16
22	Bisnis dan manajemen	-	-	-	12	12
23	Pariwisata dan Pekerjaan Umum	-	-	-	22	22
24	Nautika Kapal	-	-	-	24	24
25	Adaptif Normatif	-	-	-	21	21
JUMLAH		291	154	276	204	925

Sumber: bse.depdiknas.go.id

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Pada prinsipnya, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki kesiapan yang cukup dalam kaitannya melaksanakan program berbasis TIK. Hal ini didasari pada kenyataan sistem administrasi dan pengelolaan pendidikan berbasis teknologi (internet) kota Yogyakarta cukup maju dan memadai dibanding daerah-daerah lain di propinsi DIY. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi, Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berbasis teknologi, secara teknis memiliki kesiapan, anggaran, sumberdaya manusia, dan sistem pengelolaan untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan dan mensukseskan kebijakan BSE. Namun permasalahan belum adanya produk hukum secara khusus tentang pembagian kewenangan, peran dan fungsi bagi dinas pendidikan, menjadi

alasan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk berperan sebagai penonton di luar lapangan yang siap membantu bila diperlukan.

Sekolah

SMA Negeri 8 merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Yogyakarta yang bertaraf RSBI. Bila dilihat dari lingkungan fisik dan sarana-prasarana pembelajaran SMA Negeri 8 memiliki fasilitas pembelajaran yang sangat memadai seperti Ruang Perpustakaan, Ruang Audio Visual, Ruang Komputer/Multimedia, Ruang kelas yang dilengkapi dengan alat-alat elektronik yang mendukung proses belajar-mengajar, LCD, Sound System, dan akses internet gratis berupa *hotspot* berkecepatan 512 Kbs. SMA Negeri 8 memiliki beberapa karyawan yang bertugas khusus mengelola sistem internet dan website sekolah.

Sama halnya dengan SMA Negeri 8, SMA Negeri 9 sebagai sekolah Standar Nasional Pendidikan telah memiliki sarana-prasarana pembelajaran berbasis teknologi (*internet*) yang telah dimanfaatkan dengan baik. Fasilitas pembelajaran berupa ruang kelas yang dilengkapi dengan OHP, LCD, TV, Sound System dan jaringan internet berkecepatan 512 Kbs.

Berkaitan dengan kesiapan dalam memanfaatkan BSE sebagai salah satu alternatif sumber belajar, kedua sekolah tersebut memiliki kesiapan yang cukup mumpuni. Hanya saja, hasil observasi menunjukkan belum semua guru dan karyawan mampu mempergunakan teknologi (*internet*) dengan baik. Dengan kata lain, belum semuanya *melek* teknologi.

Analisis Implementasi Kebijakan BSE

Aspek Sosialisasi

Suatu kebijakan dapat berjalan sebagaimana diharapkan perlu didukung dengan sosialisasi terkendali. Buku teks pelajaran elektronik bagi sebagian masyarakat adalah hal yang baru, termasuk bagi warga sekolah SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9. Diketahui belum pernah dilakukan sosialisasi yang intensif oleh Kemendiknas kepada warga sekolah. Dinas pendidikan Kota Yogyakarta menyatakan, sejak program ini diluncurkan belum pernah dilakukan sosialisasi khusus pada sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. Pihak sekolah yang diharap menjadi pemanfaat utama BSE ini belum banyak mengetahui tentang BSE. Pemahaman para guru dan orangtua tentang BSE lebih banyak didapatkan dari kerabat atau sesama guru. Bagi para siswa yang mengetahui adanya BSE lebih dikarenakan ketidaksengajaan menemukan informasi tersebut ketika melakukan aktifitas *browsing* di internet.

Dari fakta tentang minimnya pengetahuan warga sekolah di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 tentang keberadaan buku teks pelajaran dalam bentuk BSE, mengindikasikan implementasi kebijakan ini

belum sesuai dengan tujuan. Pengetahuan tentang kebijakan/program sesungguhnya menjadi item pertama sebelum kebijakan itu dilaksanakan dan warga sekolah berpartisipasi dalam mensukseskannya.

Aspek Pengelolaan/Manajerial

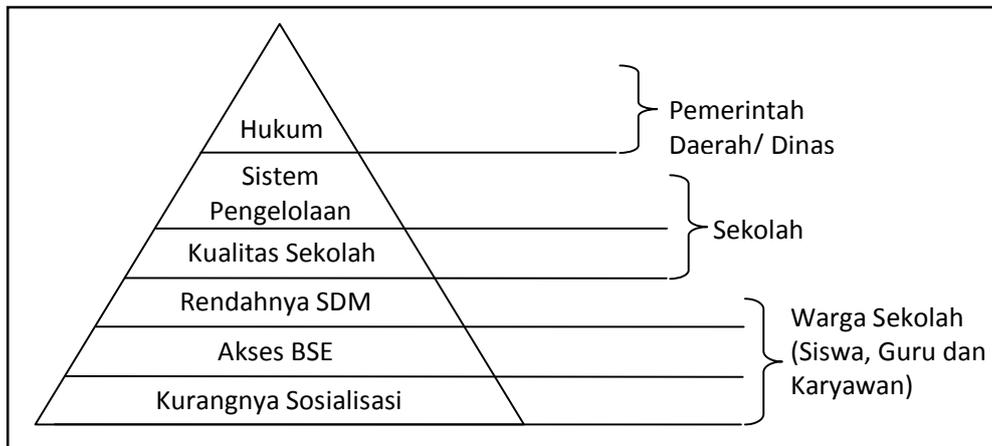
Adanya sumberdaya ahli yang bertugas mengelola jaringan internet dan website sekolah adalah modal penting. Namun hasil wawancara dan observasi menunjukkan kenyataan yang berbeda. Selain kurangnya pengetahuan warga sekolah tentang BSE, di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 belum ada sistem pengelolaan yang sengaja disediakan untuk mengelola produk BSE.

Pada SMA Negeri 8 didapati koleksi perpustakaan berupa bahan ajar elektronik/multimedia yang tersimpan dalam komputer maupun cakram VCD/DVD, termasuk file-file berisikan BSE. Akan tetapi, belum adanya sistem pengelolaan yang jelas, mengakibatkan koleksi sumber belajar elektronik tersebut tidak mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi guru dan siswa dalam mendukung proses belajar-mengajar di sekolah. Sistem pengelolaan BSE yang berpusat pada Pustekkom Kemendiknas di Jakarta, turut memperkuat fakta belum adanya sistem pengelolaan BSE.

Koordinasi Tugas dan Peran

Koordinasi menjadi faktor bagi kesuksesan pelaksanaan kebijakan BSE yang dalam rumusannya dirancang bercorak hierarkis/struktural, dari Pemerintah Pusat (Kemendiknas), Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan propinsi/kabupaten/kota), satuan pendidikan (sekolah) hingga lapisan masyarakat. Namun tidak adanya koordinasi yang jelas antar semua elemen tersebut mengakibatkan kebijakan ini hanya berjalan sepihak antara Kemendiknas sebagai inisiator dan masyarakat yang mengetahui keberadaan BSE saja. Peran aktif seluruh komponen pendidikan menjadi faktor kesuksesan pelaksanaan kebijakan BSE di SMA Negeri Kota Yogyakarta ini. Hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa Dinas Pendidikan mengambil peran sebagai fasilitator kebijakan bila diperlukan dan sekolah pun mengambil peran sebagai fasilitator implementasi kebijakan BSE.

Analisis Hambatan dalam Implementasi BSE



Gambar 2. Piramida Hambatan Implementasi BSE

Aspek Sosialisasi

Proses pengenalan dan pemberian pemahaman melalui sosialisasi dirasa sangat kurang dilakukan. Kemendiknas kurang gencar melakukan adanya BSE sehingga banyak warga sekolah, khususnya di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 yang belum mengetahui kebijakan BSE. Bukan saja pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta belum berperan aktif dalam mensosialisasikan kebijakan BSE kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Selain itu, pihak sekolah yang telah mengetahui adanya kebijakan informasi belum pro aktif menginformasikan perkembangan dan inovasi-inovasi baru bidang pendidikan seperti BSE kepada guru dan siswa.

Akses BSE

Sulitnya mendapatkan BSE dengan cara mengakses langsung melalui jaringan internet dijadikan salah satu alasan yang mengakibatkan implementasi BSE di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 tidak berjalan efektif.

Sumberdaya Manusia

Belum semua pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 mampu memanfaatkan teknologi (gaptik) sehingga turut menghambat implementasi kebijakan BSE di sekolah.

Sistem Manajerial dan Pengelolaan

Meskipun SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 memiliki sarana-prasarana pembelajaran berbasis teknologi yang cukup memadai dan terbilang sekolah yang maju dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi (internet), namun belum adanya sistem manajerial dan pengelolaan yang fokus pada

pemberian layanan terhadap alternatif sumber belajar (BSE) pada siswa, turut menghambat dalam implementasinya di lapangan.

Kualitas sekolah

Kualitas pendidikan di SMA Negeri 8 sebagai salah satu sekolah RSBI dan SMA Negeri 9 yang merupakan sekolah SSN, juga merupakan salah satu penghambat bagi implementasi kebijakan BSE di sekolah tersebut. Di mana para guru memandang muatan materi dalam buku-buku BSE bersifat standar. Sehingga bagi siswa di sekolah tersebut, buku-buku BSE kurang memadai untuk pengembangan kompetensi siswa. Disamping itu, buku-buku teks pelajaran yang tersedia dalam bentuk BSE belum banyak (kurang bervariasi).

Aspek Hukum

Diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, kejelasan akan kewenangan, tugas dan peran yang dilegitimasi melalui produk hukum mutlak diperlukan. Kebijakan BSE hanya berpijak pada Permendiknas Nomor 2 tahun 2008 tentang Buku. Kemudian, dalam implementasinya, kebijakan BSE tidak disertai dengan petunjuk teknis (peraturan) yang secara tegas membagi kewenangan, peran, dan fungsi yang harus dijalankan oleh masing-masing lembaga yang masuk dalam hierarki Kementerian Pendidikan Nasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi kebijakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 9 tidak berjalan efektif sebagaimana yang menjadi tujuan diputuskannya kebijakan BSE ini oleh Kemendiknas. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini meliputi: (1) Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat dan sekolah kepada seluruh warga sekolah (guru, karyawan, dan siswa), (2) Akses BSE yang dipandang masih sulit, (3) Kurangnya penguasaan terhadap penggunaan teknologi (internet) oleh para guru dan karyawan di kedua sekolah tersebut, (4) belum terbangunnya sistem manajerial dan pengelolaan yang fokus memberi pelayanan pada warga sekolah untuk memanfaatkan BSE, (5) Muatan materi dalam BSE kurang sesuai untuk mencapai target sekolah. Mengingat kualitas sekolah dan status sekolah yang RSBI dan SSN, dan (6) Belum adanya peraturan yang membagi kewenangan, peran, dan tugas untuk masing-masing lembaga pendidikan (Dinas Pendidikan).

Saran

Pemerintah dan sekolah diharapkan dapat: (1) mensosialisasikan BSE kepada guru dan siswa, memberi pelatihan menyeluruh dan berkelanjutan kepada guru dalam pemanfaatan BSE, (2) melakukan koordinasi dengan lembaga terkait (Dinas Pendidikan dan Sekolah), (3) membentuk tim pengawas khusus pelaksanaan BSE di masing-masing daerah, (4) menambah koleksi buku BSE, dan (5) membuat landasan hukum yang lebih kuat dan jelas bagi pembagian peran dan kewenangan masing-masing lembaga yang masuk dalam hierarki Kementerian Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sudibyo. 2009. *Pidato Mendiknas pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)*. Jakarta: Depdiknas, tanggal 2 Mei 2009.
- Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 2008. *Buku Teks Pelajaran Murah*. <http://pendidikan.jogja.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=arsip&topik=11>. [diakses pada 24 Mei 2010].
- Kemendiknas. 2010. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Pena Pendidikan. 2008. *Buku Teks Pelajaran Murah Menguntungkan Semua Pihak*. <http://www.pena-pendidikan.com/buku-teks-pelajaran-murah-menguntungkan-semua-pihak.html> [diakses pada 28 Mei 2010].
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Buku.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- Riant Nugroho. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Tepas Ahmad Heryawan. 2010. 80% Penduduk Indonesia Buta Teknologi Informasi. [Http://ahmadheryawan.com/lintas-jabar/pendidikan/9816-80-penduduk-indonesia-buta-teknologi-informasi.pdf](http://ahmadheryawan.com/lintas-jabar/pendidikan/9816-80-penduduk-indonesia-buta-teknologi-informasi.pdf) [diakses pada 30 Mei 2010].
- William N. Dunn. 1994. *Public Policy Analysis: An introduction Second Edition*. University of Pittsburgh: Prentic-Hall.Inc. Terjemahan dari: Sanodra Wibawa, dkk dari Fakultas ISIPOL Universitas Gajah Mada.